

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara rawan bencana, baik itu bencana alam maupun bencana buatan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat berdampak pada kelangsungan hidup manusia. Menurut *International Strategy for Disaster Reduction (ISDR)*, resiko terpaparnya penduduk yang mungkin kehilangan nyawa karena bencana di Indonesia sangatlah tinggi (ISDR, 2009).

Bencana adalah peristiwa yang sifatnya dapat mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat. Beberapa faktor dapat menjadi penyebab terjadinya bencana, antara lain faktor aktivitas yang ada di alam itu sendiri seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus dan angin topan, selain itu adapun berasal dari ulah manusia sendiri yang merusak alam dan tidak menjaga lingkungan sehingga dapat menyebabkan banjir, kebakaran hutan, dan tanah tsunami. (BNPB, 2017)

Bencana alam yang terjadi selama tahun 2018 tercatat 3.397 kejadian bencana di seluruh Indonesia yang mengakibatkan banyak menelan korban jiwa dan kerusakan yang besar salah satunya yaitu bencana gempa bumi disertai tsunami yang terjadi kota Donggala, Palu. Berdasarkan data dari BNPB, tercatat ada sebanyak 4.340 orang meninggal dunia, 4.438 luka-luka, serta 172.635 jiwa terdampak dan mengungsi yang berada di 122 titik. Adapun dampak kerugian yang diperoleh sebesar 2,89 triliun serta dampak kerusakan sebesar 15,58 triliun. Bencana tsunami merupakan bencana alam yang

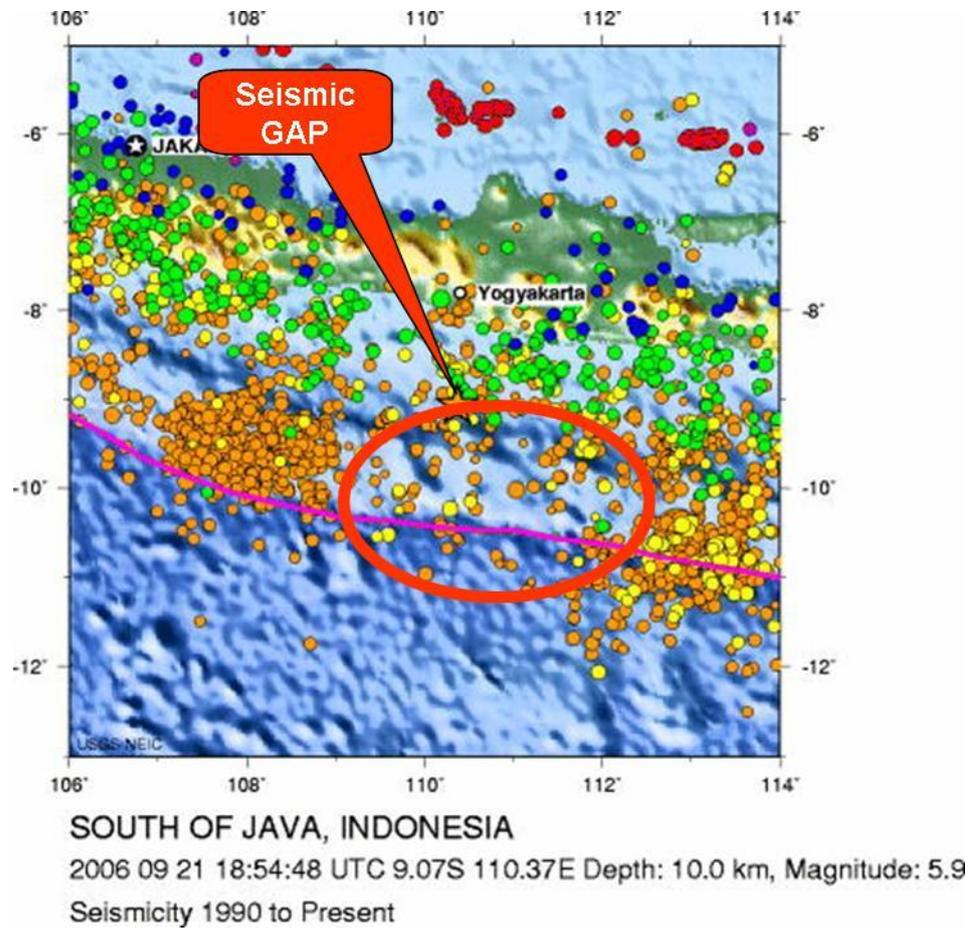
disebabkan oleh gempa bumi bawah laut ataupun tsunami laut yang menimbulkan gelombang tinggi yang dapat mencapai pemukiman pesisir laut.

Terjadinya bencana gempa di Indonesia merupakan hal lumrah dikarenakan menjadi tempat bertemunya lempeng aktif dunia, yaitu lempeng Eurasia di bagian utara, Indo-Australia di bagian selatan, dan Pasifik di timur. Pertemuan ketiga lempeng tersebut menjadikan Indonesia sebagai zona Subduksi (zona tumbukan antar lempeng). Zona Subduksi memiliki potensi terjadinya gempa Megathrust yang dapat melepaskan energi mencapai 9,0 momen magnitude (Mw).

Dari hasil relokasi kejadian gempa yang tercatat oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dan inversi data *Global Positioning System* (GPS) menunjukkan bahwa terdapat celah seismic (*seismic gaps*). Celah seismic merupakan wilayah yang berada di sepanjang batas lempeng aktif yang tidak mengalami gempa besar selama lebih 30 tahun. Keadaan tersebut kemungkinan besar terjadi penguncian (*locked*) terhadap pergeseran lempeng sehingga perlu diwaspadai dikarenakan berakibat pada akumulasi pengumpulan energi dan berpotensi menimbulkan gempa *megathrust* yang bersifat tsunamigenik. (Singh et al., 2011)

Interaksi lempeng tektonik yang menimbulkan deformasi bawah laut menyebabkan terjadinya gempa bumi dan memicu tsunami (K & Umam, 2019). Berdasarkan penelitian oleh Tim Peneliti ITB, gempa *Megathrust* memiliki potensi terjadinya tsunami yang berlokasi di selatan Pulau Jawa

dengan ketinggian maksimal mencapai 20 meter dengan rata-rata ketinggian 4,5 meter di sepanjang pantai selatan Jawa (Association, 2020).



Gambar 1. Celah Seismik kawasan pantai selatan Jawa, DIY  
Sumber: bmg.go.id

Celah seismik yang memunculkan potensi gempa *Megathrust* berhadapan langsung dengan kawasan pantai selatan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), terdapat 28 desa/kelurahan rawan tsunami di DIY yang terbagi menjadi 2 kelas bahaya, yaitu tinggi dan sedang.

Tabel 1. Kawasan Rawan Bencana Tsunami di DIY

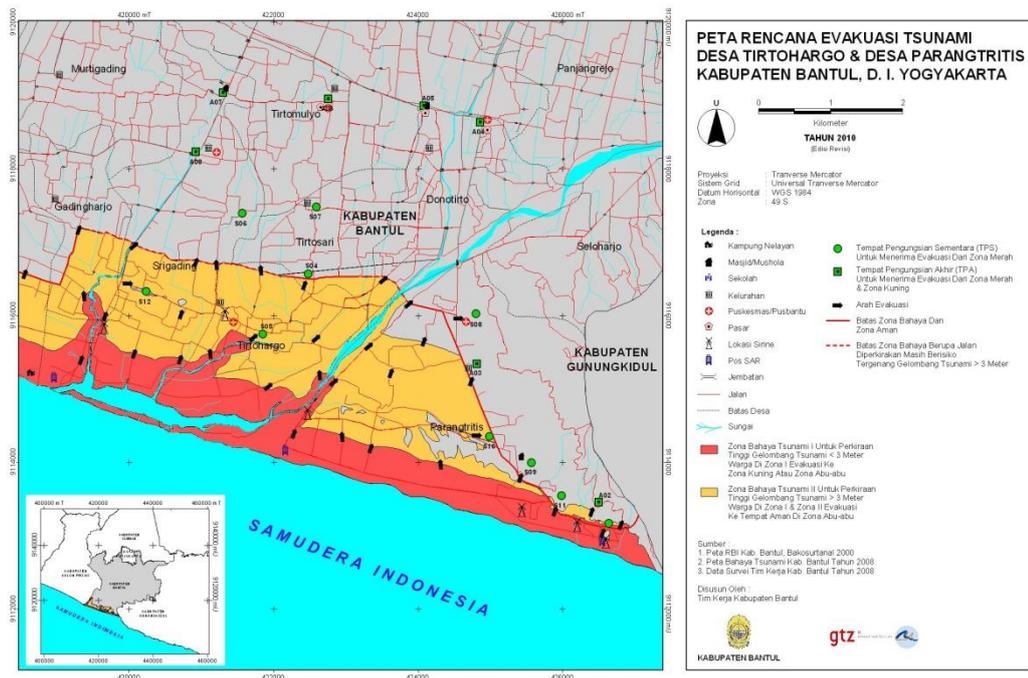
No	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Kelas Bahaya
1	<b>Bantul</b>	<b>Sanden</b>	<b>Srigading</b>	<b>Tinggi</b>
2	<b>Bantul</b>	<b>Kretek</b>	<b>Tirtohargo</b>	<b>Tinggi</b>
3	<b>Bantul</b>	<b>Kretek</b>	<b>Parangtritis</b>	<b>Tinggi</b>
4	Kulonprogo	Temon	Jangkaran	Sedang
5	Kulonprogo	Temon	Sindutan	Sedang
6	Kulonprogo	Temon	Glagah	Sedang
7	Kulonprogo	Temon	Plumbon	Sedang
8	Kulonprogo	Wates	Karangwuni	Sedang
9	Kulonprogo	Panjatan	Garongan	Sedang
10	Kulonprogo	Panjatan	Pleret	Sedang
11	Kulonprogo	Panjatan	Bugel	Sedang
12	Kulonprogo	Galur	Karangsewu	Sedang
13	Kulonprogo	Galur	Banaran	Sedang
14	Kulonprogo	Galur	Kranggan	Sedang
15	Kulonprogo	Galur	Nomporejo	Sedang
16	Kulonprogo	Galur	Brosot	Sedang
17	Kulonprogo	Lendah	Jatirejo	Sedang
18	Bantul	Srandakan	Poncosari	Sedang
19	Bantul	Srandakan	Trimurti	Sedang
20	Bantul	Sanden	Gadingsari	Sedang
21	Bantul	Sanden	Gadingharjo	Sedang
22	Bantul	Kretek	Donotirto	Sedang
23	Bantul	Kretek	Tirtosari	Sedang
24	Gunungkidul	Tepus	Sidoharjo	Sedang
25	Gunungkidul	Tepus	Tepus	Sedang
26	Gunungkidul	Tanjungsari	Kemadang	Sedang
27	Gunungkidul	Girisubo	Pucung	Sedang
28	Gunungkidul	Girisubo	Songbanyu	Sedang

Sumber: BNPB 2019

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan bahwa pada kelas bahaya tinggi terdapat 3 desa yang berada di Kabupaten Bantul, kemudian pada kelas bahaya sedang tersebar pada 3 kabupaten, yaitu 14 desa berada di Kabupaten Kulonprogo, 6 desa di Kabupaten Bantul, dan 5 desa di Kabupaten Gunungkidul. Bahaya dapat diartikan sebagai suatu fenomena fisik, atau aktivitas manusia yang berpotensi merusak, selain itu dapat menyebabkan

hilangnya nyawa atau cedera, kerusakan harta-benda, gangguan sosial dan ekonomi, atau kerusakan lingkungan (Husein, 2017).

Dari kelas bahaya tersebut maka dapat menentukan perbedaan tingkat risiko apabila terjadi bencana tsunami. Kelas bahaya tinggi memiliki tingkat risiko bencana tsunami yang lebih tinggi. Kabupaten Bantul menjadi wilayah yang memiliki tingkat resiko tinggi apabila terjadinya bencana tsunami. Menurut Kepala BPBD DIY, Biwara Yuswantana menyatakan, secara geografis wilayah Bantul menjadi wilayah yang berpotensi terjadinya tsunami. Dalam diskusi daring bertema “Menghalau Tsunami”, wilayah yang cukup rawan dan berpotensi tsunami berada di kawasan Pantai Parangtritis kearah barat dikarenakan bentuk geografis pantainya landai.



Sumber: gitews.org

Besarnya resiko akibat bencana mendorong perlunya persiapan penanggulangan bencana yang lebih terencana. Salah satu langkah yang

diambil negara dalam mempersiapkan segala potensi untuk menghadapi bencana adalah menerbitkan UU nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Menurut UU No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, kesiapsiagaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna yang terdiri dari pelatihan, gladi, penyiapan sarana dan prasarana, SDM, logistik dan pembiayaan (UU RI, 2007). Dengan kesiapsiagaan yang cepat dan tepat diharapkan dapat meminimalisir jumlah korban dan kerusakan. Kesiapsiagaan adalah tindakan-tindakan yang memungkinkan pemerintahan, organisasi, masyarakat, komunitas, dan individu untuk mampu menanggapi suatu situasi bencana secara cepat dan tepat guna (Carter, 1991).

Upaya penanggulangan ini harus ditunjang dengan adanya kesiapsiagaan di segala lini, baik itu di pemerintah maupun di masyarakat. Pemerintah mempunyai kewajiban dalam melindungi masyarakat melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dengan melaksanakan tugas dalam bidang penanggulangan bencana di tingkat daerah. BPBD diharapkan mampu bekerja sama dengan masyarakat sehingga terciptanya masyarakat yang mandiri dalam memitigasi bencana alam.

Mitigasi bencana dapat didefinisikan sebagai tindakan yang diambil sebelum bencana terjadi dengan tujuan untuk mengurangi atau menghilangkan dampak bencana terhadap masyarakat dan lingkungan (Kaharjono, 2018). Tahap pra-bencana menjadi tahapan penting. Pada fase pra bencana ada

beberapa tahapan yang dilakukan misalnya, perencanaan penanggulangan bencana, mengembangkan rencana pembangunan, analisis risiko bencana, dan pelatihan (Marina et al., 2021). Penanganan bencana membutuhkan kecepatan dan ketepatan dalam bertindak, baik itu dalam membantu korban bencana, maupun mendorong masyarakat untuk ikut andil dalam memberikan pertolongan berupa fisik atau material.

Kerjasama dilakukan karena masyarakat mempunyai andil yang cukup besar dalam meminimalisir resiko bencana. Apabila masyarakat mandiri dalam mitigasi resiko bencana maka dapat mengurangi jumlah korban jiwa saat terjadinya bencana. Hal ini tidak terlepas dari kemampuan BPBD dalam memberikan informasi yang baik sehingga koordinasi kepada masyarakat dapat berjalan dengan mudah. Selain itu, pengalaman dari kejadian bencana sebelumnya, seharusnya dapat dijadikan modal untuk pengelolaan bencana (Baseri et al., 2017). Maka dari itu, perlu adanya komunikasi yang tepat agar informasi yang disampaikan dapat dipahami secara tepat oleh masyarakat. Menurut Prof. Dr. Ronald A. Harris, dosen dari Brigham Young Univ., Utah, USA, keterbukaan informasi adalah kunci dari pengurangan resiko bencana, dengan ini masyarakat dapat mengetahui apa saja yang harus dipersiapkan dalam memitigasi bencana yang akan terjadi. ([www.bnpb.go.id](http://www.bnpb.go.id) Diakses tanggal 18 November 2021).

Upaya mitigasi bencana yang dilakukan oleh BPBD DIY salah satunya adalah pembentukan Desa Tangguh Bencana (DESTANA). Kepala BPBD DIY menyatakan bahwa sejak pertama kali dibentuk pada tahun 2012 hingga 2020, jumlah desa tangguh bencana di DIY mencapai 270 desa dari 301 desa

dengan risiko tinggi di DIY. Untuk capaian sasaran wilayah di Kabupaten Bantul, Kepala BPBD Kabupaten Bantul menyatakan bahwa pada tahun 2020 dari 75 desa di Kabupaten Bantul, sekitar 35 desa diantaranya sudah tercatat sebagai desa tangguh bencana ([www.bpbd.go.id](http://www.bpbd.go.id) Diakses tanggal 18 November 2021).

Dalam proses mitigasi bencana diperlukan manajemen komunikasi yang dapat memberikan informasi mengenai cara penanggulangan bencana. Kemampuan dalam menyebarkan informasi yang akurat kepada masyarakat umum, tokoh masyarakat, dan media dapat mengurangi resiko, menyelamatkan nyawa dan harta benda, serta mempercepat pemulihan pasca bencana (Syarif et al., 2014). Perencanaan dan pengelolaan arus informasi yang baik oleh pemerintah dalam hal mitigasi akan menentukan kredibilitas, otoritas, kepercayaan, dan efektivitas dalam proses penanggulangan bencana.

Komunikasi yang efektif antara komunikator dan komunikan dapat menentukan keberhasilan komunikasi. Kemampuan komunikasi merupakan salah satu keterampilan yang diperlukan oleh komunikator untuk menjalin interaksi dan berkomunikasi secara efektif dengan komunikan. Secara umum, proses komunikasi mengandung lima unsur yaitu pemberi, pesan, media, penerima, dan umpan balik.

Tidak dapat dipungkiri bahwa komunikasi mitigasi bencana seringkali menemui banyak kendala. Mulai dari mempresentasikan skala prioritas kebijakan dalam negeri yang diterbitkan pemerintah dengan memprioritaskan masalah teknis Geologi dan kendala masyarakat. Hambatan bahasa, hambatan pendidikan, perhatian pada kesadaran diri orang lingkungan di mana dia

tinggal dan kesulitan kepercayaan lokalnya komunitas, populasi yang berkembang pesat, epidemi yang tidak merata dan tanggapan masyarakat terhadap informasi, penyuluhan, dan pelatihan yang diadakan oleh pemerintah. (Roskusumah, 2013).

Setelah melewati berbagai penguatan landasan hukum, institusi dan pengalaman penanggulangan bencana, ternyata masih meninggalkan banyak persoalan baik itu secara konseptual maupun di lapangan. Masalah utama adalah "KIKK", yaitu komunikasi, informasi, koordinasi dan kerjasama. Dari segi kecepatan, ketepatan, akurasi-keandalan, aspek komunikasi dan informasi masih terdapat banyak permasalahan, terutama ketika bicara tentang kekacauan informasi, berbagai tindakan yang tidak tepat sasaran itu seperti distribusi logistik yang belum merata, kurangnya integrasi lintas departemen dalam penanggulangan bencana atau tumpang tindih dalam kebijakan dan operasi. (Oktarina & Sugiharto, 2012)

Penerapan mitigasi bencana tsunami belum optimal dilaksanakan oleh BPBD Bantul dikarenakan dari kegiatan yang dilaksanakan masih terfokus pada mitigasi bencana gempa bumi yang memang sebelumnya pernah terjadi di Kabupaten Bantul, sedangkan penanganan bencana tsunami perlu mendapatkan perhatian khusus.

Desa yang berada di kelas bahaya tinggi bencana tsunami yaitu desa Srigading, Tirtohargo, dan Parangtritis. Di desa Srigading sendiri, kegiatan penanganan bencana yang dilaksanakan BPBD yaitu simulasi bencana gempa berpotensi tsunami, namun simulasi itu hanya berfokus kepada penanganan bencana gempa, bukan bencana tsunami. Fokus kegiatan yang dilakukan

berkaitan terhadap evakuasi korban bencana, bukan evakuasi masyarakat dari bencana tsunami. Adapun desa Tirtohargo merupakan desa yang belum pernah dilaksanakan simulasi evakuasi bencana tsunami sebagai upaya penanganan bencana. Simulasi bencana tsunami baru pertama kali dilakukan oleh BPBD yaitu di kawasan Desa Parangtritis pada tahun 2016. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan bencana tsunami yang dilakukan oleh BPBD Bantul masih belum gencar dan merata secara signifikan (*Srigading, 2022*).

Seperti yang diketahui, bahwa gempa megathrust memiliki kekuatan mencapai 8,8 magnitudo dengan potensi tsunami berketinggian mencapai 20 meter. Menurut Dwikorita selaku kepala BMKG, menyatakan bahwa kesempatan melakukan evakuasi bencana tsunami setelah terjadinya gempa megathrust berkisar selama 22 menit dari tanda sirene dibunyikan hingga gelombang tsunami mencapai garis pantai. Hal inilah yang menjadi kekhawatiran terkait kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana tsunami megathrust. (*Suprobo, 2021*)

BPBD perlu menerapkan komunikasi kebencanaan yang baik terutama di daerah berpotensi besar mengalami tsunami. Dari sudut pandang komunikasi, strategi komunikasi kebencanaan sangat tergantung pada faktor komunikasi atau bagaimana pengelolaan faktor komunikasi yang dalam istilahnya disebut manajemen komunikasi. Berbagai faktor internal organisasi memiliki kaitan yang erat dengan faktor komunikasi untuk menjadi sebuah desain strategi komunikasi dengan formulir outputnya adalah desain komunikasi organisasi (*Sahputra, 2020*). Komunikasi kebencanaan yang baik dapat meningkatkan kapasitas dan kesiapsiagaan masyarakat dalam

menghadapi bencana, sehingga dapat meminimalisir terjadinya kerusakan properti maupun korban jiwa akibat bencana.

Riset komunikasi kebencanaan itu penting untuk dilakukan karena dalam mitigasi bencana, tidak hanya sekedar mengandalkan kemampuan di lapangan dan membantu hanya dengan masalah materi dan moral. Namun hal tersebut juga memerlukan komunikasi yang baik dan berpedoman pada etika dan substansi komunikasi dari satu sumber ke sumber lainnya. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman atau makna yang sama, maka dari itu komunikasi menjadi sangat penting dalam memberikan bantuan bencana alam (Syafuddin, 2019). Oleh sebab itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komunikasi kebencanaan yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Bantul di wilayah rawan bencana tsunami.

Selanjutnya untuk memperluas penelitian ini, peneliti paparkan hasil penelitian serupa terdahulu. Penelitian pertama, yaitu Sunnora Meilisa (Kaharjono, 2018) yang berjudul “Manajemen Komunikasi Bencana BPBD Kabupaten Magelang Dalam Pengurangan Risiko Bencana Erupsi Gunung Merapi” (2018), hasil penelitian menunjukkan bahwa BPBD Magelang menggunakan strategi mitigasi bencana berupa desa bersaudara (sister village) dan desa tangguh bencana (Destana). Kemudian, cara yang digunakan BPBD Magelang dalam menyampaikan segala jenis informasi kebencanaan dengan mengadakan berbagai kegiatan diantaranya sosialisasi, pelatihan, simulasi dan apel siaga. Selain itu, penelitian tersebut menjelaskan model komunikasi bencana pada saat normal menggunakan arus komunikasi secara struktural dan nonstruktural, sedangkan pada saat darurat hanya menggunakan arus

komunikasi nonstruktural. Pola komunikasi yang digunakan saat keadaan normal, yaitu menggunakan pola komunikasi struktur roda (wheel) dan struktur rantai (chain). Kemudian, pola komunikasi yang digunakan dalam keadaan darurat, yaitu menggunakan pola komunikasi struktur “Y”. BPBD merupakan posisi sentral pola komunikasi tersebut, sedangkan posisi sentral pola komunikasi struktur “Y” adalah BPPTKG Yogyakarta.

Erwind (Saputra, 2019) dalam penelitian yang berjudul “Manajemen Komunikasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terhadap Bencana Banjir di Kabupaten Kampar” (2018). Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen komunikasi BPBD terhadap bencana banjir di Kabupaten Kampar diantaranya adalah: 1. Perencanaan komunikasi BPBD terhadap bencana banjir di Kabupaten Kampar, disusun dalam Renja dan Renstra BPBD Kabupaten Kampar; 2. Pengorganisasian komunikasi BPBD terhadap bencana banjir di Kabupaten Kampar, disusun secara struktural dan formal, yang telah dibagi menjadi tiga bidang yakni bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, bidang Kedaruratan dan Logistik, dan bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi; 3. Pelaksanaan komunikasi yang dilakukan BPBD terhadap bencana banjir di Kabupaten Kampar, yaitu dilaksanakan oleh bidang khusus yang disebut dengan PUSDALOPS-pb yang di dalamnya memiliki unit khusus yakni Team Reaksi Cepat (TRC). Setiap informasi kebencanaan yang diterima oleh BPBD Kabupaten Kampar akan diserahkan kepada bidang PUSDALOPS-pb yang nantinya akan dikaji secara mendalam dan cepat, setelah itu akan dibuat pelaporannya.

Penelitian ketiga adalah penelitian dengan judul “Manajemen Komunikasi Bencana Gunung Sinabung 2010 saat Tanggap Darurat” (2013) yang dilakukan oleh Lestari dkk (Lestari et al., 2013), hasil penelitian menunjukkan bahwa pentingnya koordinasi dan komunikasi antar pihak terkait manajemen komunikasi bencana agar dapat mewujudkan komunikasi yang berjalan lancar dan efektif. Beberapa permasalahan yang ditemukan menjadi penggerak bahwa perlunya penerapan sistem manajemen komunikasi bencana khususnya dalam keadaan tanggap darurat untuk dapat mengurangi risiko bencana.

Perbedaan penelitian penulis dari ketiga penelitian terdahulu di atas ialah pada jenis bencana, fokus penelitian, dan karakteristik penelitian. Pada penelitian ini jenis bencana yang diambil adalah bencana tsunami dengan penyebab utama oleh gempa megathrust yang diprediksi mengakumulasi kekuatan yang sangat besar. Kemudian fokus penelitian ini lebih berpusat dalam mewujudkan komunikasi yang efektif dan efisien dalam manajemen komunikasi bencana. Bencana tsunami sendiri menjadi salah satu bencana yang paling jarang terjadi, sehingga pola komunikasi dalam penanganan bencana belum terbentuk secara utuh. Keterlibatan BPBD menjadi peran penting dalam proses komunikasi. Hal tersebut dikarenakan komunikasi yang disampaikan dan diterima oleh masyarakat akan menjadi dasar dalam tindakan tertentu.

Kesiapsiagaan masyarakat sangat diperlukan dalam menangani potensi bahaya tsunami ini, dikarenakan menjadi bencana yang memiliki dampak besar baik dari jumlah korban jiwa yang ditimbulkan maupun kerugian dari

segi ekonomi. Potensi bahaya tsunami yang disebabkan dari gempa megathrust merupakan fenomena yang menimbulkan keresahan oleh beberapa kalangan masyarakat. BPBD sudah pernah melakukan upaya dalam mengkomunikasikan kepada masyarakat salah satunya dalam bentuk simulasi. Namun, hal tersebut masih sebatas pemahaman dalam menghadapi gempa tidak disertai dengan bencana tsunami yang juga perlu penanganan tersendiri.

Besarnya risiko bencana alam berupa tsunami di Kabupaten Bantul serta pentingnya komunikasi yang dilakukan oleh BPBD membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Komunikasi kebencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana komunikasi kebencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Memitigasi bencana tsunami di Kabupaten Bantul tahun 2021?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Mendeskripsikan komunikasi kebencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam memitigasi bencana tsunami di Kabupaten Bantul.
2. Mendeskripsikan faktor-faktor pendukung dan penghambat dari komunikasi kebencanaan yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam memitigasi bencana tsunami di Kabupaten Bantul.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian merupakan kegunaan dalam setiap hasil penelitian, baik bagi kepentingan ilmu pengetahuan maupun kepentingan pengembangan

program. Dengan kata lain, data atau informasi yang telah diperoleh akan dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan. Manfaat penelitian mencakup dua aspek (Syafnidawaty, 2020) yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis adalah manfaat penelitian bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Manfaat teoritis berlatar dari tujuan verifikatif, yaitu untuk mengecek teori yang sudah ada.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan kajian pemikiran komunikasi dalam bidang kebencanaan dan ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan komunikasi kebencanaan yang efektif dan akurat untuk diterapkan di wilayah rawan bencana tsunami.

2. Manfaat praktis

Manfaat praktis atau aplikatif adalah manfaat yang berguna untuk memecahkan masalah praktis.

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat praktis bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai bahan evaluasi terkait kebijakan penanggulangan bencana tsunami di Kabupaten Bantul dalam menerapkan komunikasi kebencanaan untuk mengurangi resiko bencana di daerah rawan bencana tsunami.

## **E. Kajian Teori**

1. **Komunikasi Bencana yang Efektif**

Komunikasi dengan kata lain merupakan proses penyampaian pesan dari satu individu atau sekelompok orang kepada individu atau sekelompok orang lain baik secara langsung maupun tidak langsung seperti melalui media yang nantinya akan memperoleh respon dari penerima pesan tersebut

(Rudianto, 2015). Pada umumnya komunikasi dapat diartikan sebagai kegiatan yang berkaitan dengan hubungan baik antar individu, kelompok, organisasi maupun lembaga agar saling memahami dan membangun kepercayaan. Jadi dapat dikatakan komunikasi pada intinya adalah kegiatan penyampaian informasi untuk menciptakan kesepahaman dari satu pihak kepada pihak lainnya (Reza, 2018).

Komunikasi dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pra-bencana, termasuk: kesiapsiagaan, peringatan dini dan mitigasi. Dalam hal ini, komunikasi menginformasikan kepada masyarakat tentang persiapan yang diperlukan dan apa yang harus dilakukan saat terjadi bencana. Semua ini dirancang untuk meminimalisir korban jiwa dan harta benda. Penanggulangan bencana harus dimulai jauh sebelum bencana datang, karena antisipasi dini dapat menekan jumlah korban jiwa dan kerugian materi (Wardhani, 2011)

Menurut (Haddow & Haddow, 2009) menyatakan bahwa komunikasi bencana merupakan arus perencanaan dan pengendalian informasi yang disampaikan pada saat sebelum, selama, dan setelah terjadi bencana. Hal ini lebih lanjut dijelaskan mengenai kebutuhan terhadap adanya transparansi, peningkatan kredibilitas, kepercayaan dan keandalan dengan berbagai *stakeholder* termasuk pemerintah dan media dalam membangun komunikasi bencana yang efektif.

Menurut (Haddow & Haddow, 2009) dinyatakan bahwa terdapat 5 prinsip utama yang menjadi landasan dalam membangun komunikasi bencana yang efektif yaitu:

- 1) *Customer Focus*, yaitu memahami berbagai informasi yang dibutuhkan oleh pelanggan, diantaranya masyarakat dan relawan. Perlunya menciptakan mekanisme komunikasi yang menjamin informasi disampaikan dengan tepat dan akurat.
- 2) *Leadership commitment*, yaitu pemimpin yang memiliki peran dalam situasi tanggap darurat. Seorang pemimpin harus memiliki komitmen untuk melakukan komunikasi yang efektif dan terlibat aktif dalam proses komunikasi.
- 3) *Inclusion of Communications in Planning and Operations*, yaitu penyertaan spesialis komunikasi kedalam tim manajemen dari setiap perencanaan dan operasi manajemen darurat untuk memastikan bahwa keakuratan informasi dan waktu komunikasi dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan tindakan.
- 4) *Situational awareness*, komunikasi efektif didasari oleh pengumpulan, analisis dan diseminasi informasi yang terkendali terkait bencana. Prinsip komunikasi efektif seperti transparansi dan dapat dipercaya menjadi kunci.
- 5) *Media partnership*, media seperti televisi, surat kabar, radio, dan lainnya adalah media yang sangat penting untuk menyampaikan informasi secara tepat kepada publik. Kerjasama dengan media menyangkut kesepahaman tentang kebutuhan media dengan tim yang terlatih untuk berkerjasama dengan media untuk mendapatkan informasi dan menyebarkannya kepada publik. (e-Book Disaster Com-munications, In A Changing Media World, diakses pada tanggal 18 Februari 2022 pukul 20.30).

Lebih lanjut Haddow dan Haddow dalam (Budi HH et al., 2011) menyebutkan tentang pentingnya fokus pada target khalayak, artinya memahami karakteristik khalayak untuk memastikan pesan dan media untuk isu kebencanaan bisa mendorong pada tindakan dan perilaku mitigasi bencana. Demikian pula aspek komitmen kepemimpinan dari lembaga-lembaga yang relevan dalam penanggulangan bencana. Hal ini dilakukan sebagai upaya agar tidak terjadi tumpang tindih, kekacauan koordinasi dan keengganan kerjasama (karena budaya organisasi, pemahaman tentang bencana yang berbeda ataupun deskripsi tugas yang berbeda).

Menurut Shaw dan Gupta dalam (Budi HH et al., 2011) pada tahap sebelum kejadian bencana maka aspek komunikasi akan mencakup informasi yang akurat, koordinasi dan aspek kerjasama terutama kepada masyarakat yang rentan atas peristiwa bencana. Pada tahap kejadian bencana keempat aspek: komunikasi, informasi, kerjasama dan koordinasi merupakan kunci sukses penanganan bencana, terutama untuk penanganan korban dan menghindari risiko lebih lanjut. Pada tahap setelah bencana rekonstruksi dan pemulihan pasca situasi bencana adalah tahap penting untuk membangun kembali korban bencana dan memastikan untuk mengurangi risiko apabila terjadi peristiwa serupa dikemudian hari.

Peran komunikasi bencana sangatlah penting untuk mendukung komunikasi tetap berjalan efektif dan optimal. Komunikasi dalam manajemen bencana sangat mempengaruhi proses manajemen bencana karena komunikasi yang disampaikan dan diterima akan menjadi dasar oleh masyarakat dalam suatu tindakan tertentu.

## 2. Manajemen Bencana

Manajemen bencana merupakan seluruh rangkaian kegiatan yang meliputi berbagai aspek penanggulangan bencana pada sebelum, saat, dan sesudah terjadi bencana yang dikenal sebagai siklus manajemen bencana.

(Coppola & Erin K, 2009) mengatakan bahwa manajemen bencana modern secara komprehensif mencakup empat komponen fungsional, yaitu:

- a. *Mitigation*, yaitu kemampuan yang diperlukan untuk menghindari, menghalangi, atau mengurangi korban jiwa dan kerugian harta benda dengan mengurangi dampak dari suatu bencana atau keadaan darurat. Mitigasi mencakup reduksi atau mengeliminasi komponen risiko bahaya, seperti penilaian bahaya dan kerentanan area, rencana darurat, dan pelatihan.
- b. *Preparedness*, yaitu meliputi perencanaan, pelatihan, dan kegiatan pendidikan untuk peristiwa yang tidak dapat dimitigasi. Contohnya mengembangkan rencana kesiapsiagaan bencana seperti apa yang harus dilakukan, ke mana harus pergi, atau siapa yang harus dihubungi untuk bantuan dalam situasi darurat bencana.
- c. *Response*, yaitu kemampuan yang diperlukan untuk menstabilkan keadaan darurat saat bencana itu terjadi. *Response* mencakup tindakan yang dilakukan untuk mengurangi atau mengeliminasi dampak bencana.
- d. *Recovery*, mencakup perbaikan atau rekonstruksi kembali apa yang telah rusak/ hilang karena bencana dan idealnya mengurangi risiko dari kekacauan yang sama dimasa depan.

Keempat komponen tersebut yang saat ini menjadi platform dalam melakukan penanganan bencana, dan menjadi dasar untuk melakukan dari

operasional lapangan sampai ke pembuatan kebijakan dan strategi penanganan bencana.

Manajemen Bencana idealnya dilakukan secara sinergis dengan setiap pemangku kepentingan, terutama pemerintah dengan mengoptimalkan alat komunikasi yang ada.

### **3. Manajemen Komunikasi Bencana**

Manajemen komunikasi bencana adalah pengaturan penanggulangan bencana yang melibatkan proses komunikasi serta koordinasi antara masyarakat, pemerintah, media, dan lembaga swadaya masyarakat. Komunikasi dan koordinasi penanggulangan bencana sangat diperlukan dalam mencapai tujuan yaitu agar penanggulangan bencana dapat berjalan secara efektif dan efisien. Efektif berarti bahwa tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan, sementara efisien berarti bahwa tugas yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisir, dan sesuai dengan jadwal (Lestari, 2011).

Pada setiap kegiatan yang dilakukan manusia tidak luput dari proses komunikasi yang dimana terdapat proses penyampaian pesan dari komunikator ke komunikan, individu ke individu lain, dari individu ke kelompok, dari kelompok ke kelompok, dan dari kelompok ke individu secara timbal balik. Begitu juga di dalam proses manajemen yang merupakan sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan hingga evaluasi.

Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh Puji Lestari (Lestari, 2018) yang menjelaskan bahwa proses manajemen terdapat empat tahap yaitu:

- a. Perencanaan, yakni proses dalam kegiatan identifikasi masalah melalui pemikiran dan dugaan serta penentuan focus utama yang harus dilakukan secara rasional sebelum melewati proses tindakan dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.
- b. Pengorganisasian, yakni proses penetapan dalam pembagian kerja ke dalam setiap unit-unit kerja yang disesuaikan dengan fungsi-fungsinya agar setiap unit kerja diduduki oleh orang-orang yang tepat.
- c. Pelaksanaan, yaitu mengambil tindakan dan komunikasi. Pada tahap ini suatu organisasi perlu melaksanakan tindakan yang tepat untuk diimplementasikan dan menentukan sasaran yang tepat serta mengetahui bagaimana cara penyampaian pesan kepada target agar dapat diterima dengan baik.
- d. Evaluasi, yaitu mengevaluasi program. Pada tahap ini mengukur dan menilai sejauh mana keberhasilan kegiatan dari semua program yang telah dilaksanakan, maka dapat diketahui kegiatan mana yang perlu dilakukan untuk rencana berikutnya dan mana yang tidak perlu dilakukan.

Peran komunikasi kebencanaan sangatlah penting untuk mendukung tahapan manajemen agar tetap optimal dan berjalan dengan baik. Konsep komunikasi kebencanaan bertujuan agar penanganan bencana dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Efektif berarti tujuan dari strategi dan upaya yang telah dibuat berjalan sesuai rencana, sedang efisien berarti tugas yang dibuat dalam strategi tersebut dijalankan dengan terorganisir.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian sebuah karya ilmiah, diperlukan sebuah metode penelitian agar dapat efektif dan sistematis dalam penyusunannya. Dalam penelitian komunikasi mempunyai prinsip lintas disiplin (interdisciplinary) karena aktivitas menyentuh seluruh aspek kehidupan, psikologis, sosial, politik, ekonomi, budaya, sejarah, etika, seni dan filsafat (Parwito, 2007).

Metode adalah aturan untuk mengambil sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis, sedangkan metodologi adalah pengkajian pembelajaran mengenai peraturan-peraturan suatu metode. Jadi, metodologi penelitian ialah pengkajian dalam mempelajari peraturan yang ada dalam penelitian (Usman & Setiady, 2009)

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskripsi dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian deskriptif adalah sekumpulan kegiatan pengumpulan data dalam rangka menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan mengenai suatu permasalahan pada waktu yang sedang berjalan dari ide utama suatu penelitian (Hikmat, 2011). Peneliti akan terjun langsung ke lapangan untuk mencari data, fakta dan informasi yang dibutuhkan.

Metode kualitatif mengandung unsur persepsi subjektif bahwa kenyataan (komunikasi) bersifat ganda, rumit, semu, dinamis (mudah berubah), dikonstruksikan, dan holistik, kebenaran bersifat relatif. Metode kualitatif sebagai aturan kerja penelitian yang melahirkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang serta berperilaku yang dapat diamati secara terperinci (Hikmat, 2011).

Penelitian kualitatif adalah satu konsep keseluruhan dalam mengungkapkan rahasia tertentu, dilakukan dengan menghimpun dan mengelola data dalam keadaan sewajarnya, menggunakan cara kerja lapangan yang tersistematis, terarah dan dapat dipertanggung jawabkan, sehingga tidak kehilangan sifat ilmiahnya atau kumpulan kegiatan atau proses menjangkau data/informasi yang bersifat sewajarnya. Penelitian kualitatif menekankan pada kualitas atau hal yang terpenting dari sesuatu yang diteliti (Satori & Komariah, 2011).

Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan atau penyelidikan untuk memahami secara mendalam mengenai gejala sentral. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada pembahasan panjang (Sugiyono, 2012)

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma interpretif. Paradigma ini pada dasarnya melihat fakta sebagai sesuatu yang unik dan memiliki konteks dan makna yang khusus sebagai esensi dalam memahami makna sosial. Interpretif melihat fakta sebagai hal yang cair (tidak kaku) yang melekat pada sistem makna dalam pendekatan interpretatif. Fakta-fakta tidaklah imparsial, objektif dan netral. Fakta merupakan tindakan yang spesifik dan kontekstual yang bergantung pada pemaknaan sebagian orang dalam situasi sosial. Interpretif menyatakan situasi sosial mengandung

ambiguisitas yang besar. Perilaku dan pernyataan dapat memiliki makna yang banyak dan dapat diinterpretasikan dengan berbagai cara. (Neuman W, 2000)

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus yaitu suatu studi yang memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan mendetail. Secara umum studi kasus merupakan strategi yang lebih cocok dimana pertanyaan penelitiannya berkaitan dengan pertanyaan *how* atau *why*, peneliti hanya memiliki sedikit peluang dalam mengontrol peristiwa-peristiwa yang akan diselidiki dan bilamana fokus penelitiannya terletak pada fenomena kontemporer (masa kini) didalam konteks kehidupan nyata. (Yin, 2019)

## **2. Teknik Pengumpulan data**

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu wawancara mendalam dan dokumentasi.

### **a. Wawancara Mendalam**

Wawancara mendalam (*in-depth interview*) merupakan proses menggali informasi secara mendalam, terbuka, dan bebas dengan masalah dan fokus penelitian serta diarahkan pada pusat penelitian. Dalam hal ini metode wawancara mendalam yang dilakukan dengan adanya daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya (Moleong, 2014).

Dalam wawancara mendalam melakukan penggalian secara mendalam terhadap satu topik yang telah ditentukan (berdasarkan tujuan dan maksud diadakan wawancara tersebut) dengan menggunakan pertanyaan terbuka. Penggalian informasi dilakukan untuk mengetahui pendapat mereka berdasarkan perspektif responden dalam memandang sebuah permasalahan.

Teknik wawancara ini dilakukan oleh seorang pewawancara dengan mewawancarai satu orang narasumber secara tatap muka (*face to face*).

Penulis membaagi narasumber atau informan dalam penelitian ini menjadi dua kelompok, yakni BPBD Kabupaten Bantul dan *stakeholder*. *Stakeholder* yang dimaksud adalah pemerintah desa yang berada di kelas bahaya tinggi dan sangat rentan akan potensi bahaya tsunami, yaitu Desa Srigading, Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul. Alasan penulis memilih narasumber diatas, karena dianggap relevan dengan penelitian ini dan diharapkan narasumber tersebut dapat membantu dan mempermudah proses pengambilan data. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut.

Tabel 2. Informan Penelitian

No	Informan	Nama
1	Staf Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Pasca Bencana	Malichah Kurnia Pratiwi, S.Si
2	Supervisor PUSDALOPS BPBD BANTUL	Aka Lukluk Firmansyah, S.Kom
3	Kepala Desa Srigading	Ir. R. Prabawa Suganda

b. Dokumentasi

Dokumentasi menurut (Sugiyono, 2015) adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah. Sumber utama metode ini diambil langsung dari objek penelitian.

Pada penelitian ini penulis mengumpulkan dokumen pendukung yang dapat dipakai dalam penelitian seperti foto kegiatan, rekaman wawancara dengan narasumber, berkas presentasi sosialisasi, simulasi dan pelatihan

dalam bentuk file power point maupun format lainnya. Selanjutnya adalah sumber tertulis seperti hasil kajian, evaluasi program dan lainnya baik dari media online maupun offline.

### **3. Teknik Analisis Data**

Setelah tahap pengolahan data, tahap selanjutnya yaitu melakukan analisis data. Analisis data adalah proses penyusunan data lalu diterjemahkan. Menyusun data berarti menggolongkannya dalam pola, tema atau kategori (Usman, 2009). Analisis data mengacu pada target penelitian untuk menemukan teori, bersifat deskriptif sesuai hasil wawancara bersama narasumber dan observasi langsung untuk mendapatkan gambaran tentang persoalan yang sedang diteliti.

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari bermacam sumber melalui teknik pengumpulan data yang bermacam-macam dan dilakukan secara berkelanjutan. Dengan begitu mengakibatkan variasi data menjadi tinggi. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sebelum di lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan, lalu semua data dikumpulkan. Mengumpulkan semua data menganalisis dan mendeskripsikan menjadi sebuah tulisan (Sugiyono, 2012).

Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2010) menjelaskan bahwa analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung sampai selesai, sehingga datanya menjadi jenuh. Aktivitas dalam analisis data sebagai berikut:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan tahapan penyempurnaan data, dalam reduksi data peneliti melakukan pengurangan terhadap data yang dianggap tidak sesuai dan tidak relevan dengan penelitian, ataupun menambahkan data yang dirasa masih kurang lengkap. Data yang diperoleh di lapangan terkadang berjumlah sangat banyak. Dalam reduksi data akan dirangkum dan dipilih hal-hal yang pokok dan penting, kemudian ditentukan tema dan gagasan pendukung. Dengan begitu data yang sudah direduksi dapat memberikan gambaran yang lebih jelas, serta mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data (Reza, 2018).

b. *Data display* (penyajian data)

Setelah melalui proses reduksi data, data dapat disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan dan korelasi antar kategori. Dengan mendisplaykan data, akan mempermudah peneliti untuk memahami apa yang terjadi, dan kemudian dapat merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah di pahami (Reza, 2018).

c. *Conclussion drawing* (verifikasi)

Langkah ini menurut Miles dan Huberman merupakan suatu pengambilan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan pertama yang dikemukakan masih bersifat sementara dan bisa berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi, apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap pertama didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten. Maka kesimpulan yang

dikemukakan merupakan kesimpulan yang konsisten dan kredibel (Sugiyono, 2010).

Pada tahap ini peneliti memperoleh data dari berbagai sumber yaitu wawancara, serta catatan lapangan, dokumen dan data lain yang dapat mendukung.

#### **4. Uji Validitas**

Uji Validitas data dilakukan untuk membuktikan dan menunjukkan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji serta mengoreksi data yang diperoleh (Sugiyono, 2010). Uji validitas data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan melalui triangulasi data. Wiliam Wiersma (1986) memaparkan triangulasi dalam pengujian kredibilitas dibagi menjadi triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu (Sugiyono, 2010)

##### **a. Triangulasi Sumber**

Triangulasi sumber merupakan cara pengujian kredibilitas data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui sumber utama. Data yang telah diperoleh dari sumber utama dianalisis dan disimpulkan, kemudian dilakukan pengecekan dengan sumber data lainnya untuk mengetahui apakah data tersebut sudah sesuai dengan data dari sumber utama.

##### **b. Triangulasi Teknik**

Merupakan pengujian kredibilitas data dengan cara mengecek ulang data kepada sumber yang sama tetapi dengan teknik yang berbeda. Misalnya melakukan pengecekan data dengan teknik yang berbeda seperti melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Jika dengan teknik yang berbeda

tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data untuk memastikan data mana yang dianggap benar dan valid.

c. Triangulasi Waktu

Dalam proses pengumpulan data peneliti harus memperhatikan ketepatan situasi dan kondisi, sebagai contoh data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih menghasilkan data yang kredibel. Selanjutnya validasi data dapat di cek kembali dengan teknik wawancara, observasi atau teknik lain dalam kondisi dan situasi yang berbeda. Jika data hasil uji yang di dapatkan berbeda, maka diulangi lagi pengambilan datanya sampai ditemukan data yang valid (Sugiyono, 2010).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode triangulasi sumber untuk memeriksa validitas data, yang artinya melakukan perbandingan dan mengecek balik keabsahan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda (Moleong, 2014)

Dengan menggunakan metode triangulasi sumber, setelah penulis memperoleh data dari sumber data pertama yaitu Kepala Bagian Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Bantul, kemudian penulis akan melakukan uji validasi data dengan cara melakukan wawancara dengan sumber lain yaitu Staf Bagian Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Bantul yang kemudian hasil yang diperoleh akan dibandingkan dan dinilai keabsahannya. Jika hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan data

utama, maka akan diulangi lagi proses pengambilan datanya sampai ditemukan data yang valid.